

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak bergulirnya reformasi, Indonesia telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak empat kali– 1999, 2004, 2009 dan 2014. Sebagai sebuah perhelatan demokrasi, Pemilu Indonesia mungkin adalah kegiatan kepemiluan paling kompleks di dunia. Terdapat empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru negara yang terdiri atas 17.000 pulau. Mereka bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan sekitar 19.700 kandidat dalam satu pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah.¹

Sejauh ini, pemilu-pemilu tersebut dapat berlangsung dengan relatif bebas dan damai. Berdasarkan prestasi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilu itu tak mengherankan bila Indonesia saat ini disebut sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Namun, kesuksesan itu dinilai masih belum memuaskan bila pendapat pemilih difabel turut diperdengarkan.² Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel. Istilah difabel pertama kali dicetuskan sekitar tahun 1996 oleh beberapa

¹“Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014 di Indonesia,” Rumah Pemilu, diakses 30 Mei 2015, <http://www.rumahpemilu.org/in/read/3366/Brief-Overview-of-the-2014-Elections-in-Indonesia.html>

² “Workshop Partisipasi Politik Difabel dalam Pemilu 2014,” Temu inklusi 2014, diakses 1 Juni 2015, <http://ti2014.solider.or.id/events/20-sabtu/workshop-partisipasi-politik-difabel-dalam-pemilu-2014>

aktivis di Yogyakarta, yang salah satunya adalah Mansour Fakih. Penggunaan kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.³ Jadi difabel sejatinya adalah konter terhadap diskursus cacat.⁴ Dengan pengertian seperti itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya memiliki kekurangan dan ketidakmampuan. Mereka harus dipandang sebagaimana layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda. Sebuah sikap positif dalam memandang kaum difabel.

Jika diperkirakan jumlah difabel mencapai lebih dari 10 persen dari total penduduk Indonesia maka secara gambaran kasarnya bisa diasumsikan bahwa jumlah pemilih difabel adalah sekitar 10 persen dari total jumlah pemilih di Indonesia berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berjumlah 185.822.507 pada pemilu lalu. Maka, kisaran jumlah pemilih difabel adalah sekitar 18 juta lebih pemilih. Dari segi kuantitas, tentu bukanlah jumlah yang sedikit.⁵

Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa saat ini kaum difabel masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Padahal, hak kaum difabel dalam berpolitik sebenarnya telah dijamin oleh undang-undang dimana salah satunya adalah setiap warganegara diberikan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Permasalahan yang dihadapi kaum difabel dialami tidak hanya saat hari pemungutan suara di

³ Bahrul Fuad, "Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis," Cak Fu, diakses 1 Juni 2015, <http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-ideologis/>

⁴ Mansour Fakih. "Akses Ruang Yang Adil Meletakkan dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel." (Makalah dipresentasikan dalam Diseminasi Nasional "Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua" di Yogyakarta 27 – 28 September 1999), diakses 1 Juni 2015, <http://suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel>

⁵ "Workshop Partisipasi Politik"

TPS, tapi juga jauh-jauh hari sebelumnya terutama dalam hal akses informasi pemilu.

Hambatan seperti ini diantaranya banyak dialami oleh para difabel tunanetra. Para pemilih tunanetra ini karena keterbatasannya tidak mendapat informasi yang mencukupi terkait dengan pemilu. Berbagai liputan media telah mengulas persoalan ini. Misalnya mengenai sejumlah pemilih tunanetra pada Pemilu DPR/DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang mengaku tidak mendapat sosialisasi yang cukup terkait dengan tata cara pemilihan.⁶ Bahkan sebagian dari mereka kemudian tidak mencoblos atau golput karena ketidaktahuan tentang calon yang akan dipilih.⁷

Indra penglihatan merupakan salah satu instrumen vital bagi manusia untuk menyerap informasi. Bahkan dapat dikatakan sebagian besar informasi yang diperoleh oleh manusia berasal dari indera penglihatan. Dengan demikian dapat dipahami ketika seorang mengalami gangguan penglihatan maka kemampuan dalam mengakses informasi menjadi semakin terbatas. Dengan kata lain hilangnya indera penglihatan berarti hilangnya pula saluran informasi visual.⁸ Padahal sebagian besar informasi terkait pemilu tersedia secara visual. Hal ini tentu akan mempengaruhi serapan informasi yang diterima oleh para difabel tunanetra yang pada gilirannya akan berpengaruh pula terhadap tingkat literasi politik (kemelekkan politik) mereka.

⁶ “Minim Sosialisasi Pilpres Untuk Tunanetra,” *Sinar Harapan*, 4 Juli 2014, diakses 30 Mei 2015, <http://sinarharapan.co/news/read/140704345/minim-sosialisasi-pilpres-untuk-tunanetra-nbsp->

⁷ “Minat warga Difabel dalam Pemilu Masih Kurang,” *Kavling 10*, diakses 30 Mei 2015, <http://kavling10.com/2014/04/minat-warga-difabel-dalam-pemilu-masih-kurang/>

⁸ Hernowo. “Pembelajaran Adaptif Tunanetra.” Her Spasi Nowo, diakses 2 Juni 2015, <https://herspasiowo.wordpress.com/2015/06/13/makalah-pembelajaran-adaptif-tuna-netra/>

Literasi politik secara singkat didefinisikan oleh Krosnick, sebagai “the state of having political information”,⁹ suatu keadaan dimana seseorang memiliki informasi politik. Kepemilikan atas informasi politik ini akan sangat menentukan perilaku memilih mereka. Yudi Latif dengan mengutip pendapat Martel (1983) menyatakan bahwa publik yang *well-informed* (mendapat akses informasi secara luas) akan lebih menekankan aspek-aspek substansi yang diusung oleh kandidat, sebaliknya publik yang *less informed* (kurang mendapat akses informasi) akan lebih menekankan aspek- aspek personalitas.¹⁰

Salah satu indikator keberadaban suatu bangsa adalah bila derajat aksesibilitas untuk para difabel semakin bagus. Artinya kemudahan bagi kaum difabel dalam mewujudkan kesamaan dalam segenap aspek kehidupan dan penghidupan semakin membaik. Termasuk akses para tunanetra terhadap informasi pemilu. Oleh karena itu penelitian untuk mengetahui literasi politik para difabel tunanetra dalam pemilu ini sangatlah penting untuk dilakukan, sebab isu terkait literasi politik pemilih tunanetra selama ini masih sangat jarang dikaji di Indonesia. Untuk konteks Kabupaten Banjarnegara, populasi pemilih tunanetra cukup banyak dan menyebar di hampir semua kecamatan yang ada. Menurut data dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) tahun 2015, jumlah kaum difabel tunanetra menempati peringkat kedua teratas dari

⁹ Zafer Kus , “Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher”, *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 177 (2015) :197.

¹⁰ Yudi Latif, “Debat Capres, Bukan Basa-basi,” *Kompas*, 28 Juni 2004

keseluruhan jenis difabilitas yang ada.¹¹ Sejauh ini juga belum pernah ada penelitian terkait kemelekan politik pemilih tunanetra di daerah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kondisi kemelekan politik para pemilih tunanetra di Banjarnegara?
- b. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada terbentuknya kemelekan politik para pemilih tunanetra di Banjarnegara?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalahnya, maka fokus penelitian ini dibatasi pada literasi politik para pemilih tunanetra di Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum DPR/DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalahnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

¹¹ Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). *Daftar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015*. (Banjarnegara : Dinsosnakertrans. 2015)

- 1) Mengetahui dan memahami kondisi kemelekan politik para pemilih tunanetra di Banjarnegara pada Pemilihan Umum DPR/DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun; dan
- 2) Mengetahui dan memahami faktor-faktor yang berpengaruh pada terbentuknya kemelekan politik para difabel tunanetra di Banjarnegara pada Pemilihan Umum DPR/DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik khususnya mengenai kajian manajemen pemilu dan partisipasi politik kaum marjinal. Pengembangan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi pengayaan materi pengajaran dan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berupa rekomendasi kepada para pemangku kebijakan dan penyelenggara pemilu, sebagai bahan untuk menyusun kebijakan yang dapat memperkuat dan meningkatkan literasi politik kaum difabel khususnya para difabel tunanetra.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Fokus penelitian ini adalah literasi politik para pemilih tunanetra di Kabupaten Banjarnegara pada Pemilihan Umum DPR/DPD dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menjelaskan kemelekan politik pemilih tunanetra dibutuhkan konsep-konsep penunjang yang bisa menjadi referensi peneliti dalam melakukan analisis. Konsep-konsep tersebut dalam tinjauan pustaka ini tertuang dalam landasan teori. Selain itu, dalam tinjauan pustaka juga dipaparkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu. Ini dimaksudkan untuk memperjelas posisi penelitian ini dihadapan penelitian-penelitian yang pernah ada

2.1.1 Literasi Politik

Secara tradisional literasi selama ini dipahami sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis.¹² Dengan berkembangnya waktu makna literasi menjadi semakin berkembang dari masa ke masa. Arti istilah ini telah diperluas untuk mencakup kemampuan dalam menggunakan bahasa, angka, gambar dan cara lain untuk memahami dan menggunakan sistem simbol dominan budaya.¹³

¹² Collin Cobuild, *New Student Dictionary* (New York : Harper Collin Publisher, 2002), 409.

¹³ UNESCO. "Understanding of Literacy" dalam *Education for All Global Monitoring Report 2006*, UNESCO, diakses 30 Mei 2015, http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf

Lebih lanjut, UNESCO mendefinisikan literasi sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan bahan cetak dan tertulis terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan kontinum belajar dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka dan masyarakat yang lebih luas.¹⁴

Pada masa yang lampau membaca dan menulis dianggap cukup sebagai pendidikan dasar sebagai bekal kemampuan bagi manusia untuk menghadapi tantangan zamannya. Oleh karena itu literasi selama bertahun-tahun dianggap sekedar persoalan psikologis yang berkaitan dengan kemampuan mental dan keterampilan baca-tulis. Padahal literasi adalah praktik kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial dan politik.¹⁵ Pada perkembangannya saat ini kata literasi banyak disandingkan dengan kata-kata lain, misalnya literasi virtual, literasi komputer, literasi informasi, literasi politik dan sebagainya.

Terkait dengan literasi politik sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, didefinisikan secara singkat oleh Krosnick (1990) sebagai keadaan memiliki informasi politik.¹⁶ Definisi ini menghubungkan literasi politik dengan aspek kognisi seseorang terkait dengan politik. Sementara ilmuwan lainnya, Porter dan Crick (1985) misalnya mencoba untuk menambahkan aspek sikap dalam kaitannya dengan literasi politik. Dalam penjelasannya tentang

¹⁴ UNESCO, *The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs* (Paris ; UNESCO, 2004), 13.

¹⁵ A Chaidar Alwasilah, *Pokoknya Rekayasa Literasi*. (Bandung: Kiblat Buku Utama, 2012), 159

¹⁶ Kus, "Political Literacy," 197

hubungan antara pendidikan politik dengan literasi politik, mereka menyatakan bahwa tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk meningkatkan 'melek politik', yakni suatu keadaan yang berkaitan dengan bukan hanya pengetahuan, namun juga keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk membuat seseorang mendapat informasi yang memadai tentang politik, dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan dengan semua kelompok serta untuk dapat mengenali dan mentolerir keragaman nilai-nilai sosial dan politik.¹⁷

Meskipun demikian, sebagian besar definisi melek politik memberikan penekanan pada fenomena pengetahuan politik. Misalnya Zaller (1992) mendefinisikan melek politik sebagai pemahaman individu mengenai peristiwa politik dan kesadaran politik mereka, sementara itu itu, Denver dan Hands (1990) dan Wormald (1988) menyatakan bahwa melek politik bisa juga diartikan sebagai keadaan individu untuk bersentuhan dengan proses politik dan urusan politik sebagai warga negara yang efektif dan pemahaman atas persoalan tersebut untuk memenuhi peran kewargaan mereka.¹⁸

Penjelasan mengenai literasi politik yang memberikan titik berat pada aspek kognisi politik ini diperkuat dengan pendapat Carol A. Cassel dan Celia C. Lo yang memberikan contoh konkret terkait seseorang yang dapat dianggap melek politik apabila memahami perbedaan antara partai-partai serta mengetahui konsep dasar dan fakta dalam politik.¹⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan literasi politik difokuskan pada aspek pengetahuan politik

¹⁷ Margaret Chang Yan, "Study of Political Literacy of Women Group Members in Community Development Service in Hong Kong" (Disertasi PhD, University of Hong Kong, 1993)

¹⁸ Kus, "Political Literacy," 197

¹⁹ Carol A. Cassel dan Celia C. Lo, "Theories of Political Literacy," *Political Behaviour* 19, no. 4 (1997), 317

yang dibutuhkan seseorang untuk menjadi melek politik. Dalam penelitian ini istilah literasi politik akan dipakai bergantian dengan kemelekan politik.

2.1.2 Difabel Sebagai Konter Diskursus

Istilah difabel telah digunakan secara luas sebagai pengganti kata disable atau penyandang cacat yang dipandang mengandung konotasi negatif. Istilah yang pertamakali diusulkan oleh Mansour Fakih pada tahun 1996 ini merupakan akronim dari *different abilities people* yang berarti orang yang memiliki perbedaan kemampuan. Menurut Mansour Fakih, kata cacat yang selama ini telah jamak dipakai sebenarnya tidak layak dilekatkan pada manusia, sebab kata cacat seringkali digunakan untuk benda-benda yang rusak. Melalui istilah difabel ini ia berupaya menempatkan para penyandang cacat pada posisinya sebagai manusia. Karenanya ia meyakini bahwa kata difabel lebih humanis dibandingkan dengan kata penyandang cacat.²⁰

Selain itu, dalam pandangan Mansour pada kata cacat sejatinya tersimpan bentuk ketidakadilan sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Pelabelan istilah penyandang cacat justru bermula dari keyakinan ideologis masyarakat, akademisi maupun birokrat tentang apa yang dinamakan cacat itu yang sebenarnya adalah hasil konstruksi sosial. Dari label cacat ini tersembunyiilah pengertian tentang 'baik' dan 'tidak baik' maupun 'normal' dan 'tidak normal'. Penggunaan istilah difabel adalah sebuah konter diskursus alias wacana tanding atas istilah cacat, sebagai usaha untuk membongkar jenis ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh warga masyarakat yang oleh konvensi sosial disebut penyandang

²⁰ Fuad, "Perlawanan Ideologis."

cacat. Upaya untuk membongkar konvensi sosial ini merupakan salah satu bentuk resistensi dan pemberdayaan yang hakiki yakni dengan melakukan dekonstruksi atas diskursus '*disable*' ataupun 'penyandang cacat' dengan memunculkan wacana tandingan yang lebih adil dan memberdayakan, yaitu istilah 'difabel'.²¹

Lebih lanjut Mansour Fakih menjelaskan bahwa dalam istilah difabel tidak ada lagi pembedaan antara 'manusia normal' dengan mereka yang mendapat julukan kaum 'penyandang cacat' yang dalam prakteknya pembedaan ini telah menimbulkan setidaknya lima manifestasi ketidakadilan dan diskriminasi yakni *pertama*, berlangsungnya diskriminasi ekonomi sehingga melahirkan pemiskinan ekonomi terhadap kaum difabel. *Kedua*, terjadinya *subordinasi* terhadap kaum difabel baik dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara dalam bentuk banyaknya kebijakan dibuat tanpa sama sekali menganggap keberadaan mereka. *Ketiga*, adanya pelabelan negatif (*stereotype*) terhadap kaum difabel yang berakibat pada diskriminasi serta berbagai ketidakadilan lainnya. Misalnya adanya anggapan bahwa 'manusia normal' adalah produktif, maka kaum difabel dinilai '*tidak produktif*' dan oleh sebab itu boleh dibayar dengan upah lebih rendah. *Keempat*, terjadinya kekerasan (*violence*) terhadap difabel baik dalam bentuk fisik maupun bentuk yang halus semacam sikap yang merendahkan kemampuan mereka maupun kekerasan yang dilakukan negara dalam bentuk tidak dibukanya akses sarana publik kaum difabel. Kelima, sempitnya akses sosial dan budaya serta fisik bagi kaum difabel yang mempersukar ruang gerak kaum difabel dan

²¹ Fakih, "Akses Ruang Yang Adil."

telah menyebabkan beban kerja yang luar biasa bagi kaum difabel baik di lingkungan domestik maupun publik.²²

Sebagai sebuah istilah, kata difabel memang tidak akan ditemui dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun dalam Kamus Bahasa Inggris. Namun dalam perkembangannya kata difabel telah luas digunakan oleh masyarakat dan media massa baik koran maupun televisi. Media nasional semacam Harian Kompas juga sering menggunakan kata difabel di dalam pemberitaan-pemberitaannya. Bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi pertanda bila istilah difabel saat ini telah *acceptable* atau dapat diterima oleh publik.²³

2.1.3 Hak Politik Kaum Difabel Dalam Pemilu

Kaum difabel adalah bagian dari warga negara. Sebagai warga negara, kaum difabel memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu hak yang dijamin oleh konstitusi adalah persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pasal ini memberikan jaminan kehidupan berpolitik yang setara kepada setiap warga negara termasuk didalamnya kaum difabel.

Selain telah adanya jaminan dari konstitusi, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas PBB pada tanggal 18 Oktober Tahun 2011 lalu dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011.

²² Fakih, "Akses Ruang Yang Adil."

²³ Fuad, "Perlawanan Ideologis."

Konvensi ini memuat hak-hak kaum difabel dalam segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya kehidupan berpolitik, termasuk dalam hal pemilihan umum. Hak-hak kaum difabel dalam pemilu dijamin oleh pasal 9 mengenai aksesibilitas dan pasal 29 mengenai hak-hak kehidupan politik dan publik bagi kaum difabel. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel agar terwujud kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pasal 9 CRPD berbunyi :²⁴

1. Untuk memungkinkan masyarakat penyandang disabilitas dapat hidup secara independen dan berpartisipasi penuh dalam segala aspek kehidupan, negara-negara anggota mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar masyarakat penyandang disabilitas memiliki akses yang setara dengan masyarakat lain untuk memperoleh ke lingkungan fisik, transportasi, informasi dan komunikasi, termasuk teknologi dan sistem informasi dan komunikasi, serta ke fasilitas-fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Langkah-langkah ini, yang termasuk diantaranya identifikasi dan eliminasi berbagai rintangan dan halangan yang ada dalam hal aksesibilitas, akan diterapkan antara lain ke:
 - a. Sarana bangunan, jalan, transportasi serta berbagai fasilitas dalam dan luar ruangan, termasuk sekolah, rumah, fasilitas medis dan tempat kerja;

²⁴ Pusat Pemilihan Umum Akses–Difabel Cacat (PPUA-PENCA), *Buku Panduan Akses Pemilu. Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas* (Jakarta: PPUA-PENCA, 2011), 5.

- b. Informasi, komunikasi dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik serta layanan darurat.
2. Negara-Negara Anggota juga akan mengambil langkah-langkah berikut:
 - a. Mengembangkan, menetapkan dan mengawasi implementasi standar dan pedoman minimum untuk mengakses fasilitas dan layanan yang terbuka dan tersedia bagi masyarakat;
 - b. Memastikan bahwa pihak swasta yang menawarkan fasilitas dan layanan yang terbuka atau tersedia untuk publik juga mempertimbangkan seluruh aspek aksesibilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas;
 - c. Memberikan pelatihan bagi para pemangku kepentingan mengenai isu-isu aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas;
 - d. Menempatkan tanda-tanda dalam huruf Braille dalam bentuk yang mudah untuk dibaca dan dimengerti di dalam gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka untuk publik;
 - e. Menyediakan berbagai bentuk bantuan/asistensi dan tuntunan, baik pemandu, pembaca serta penerjemah bahasa isyarat, untuk memfasilitasi aksesibilitas ke gedung dan fasilitas lainnya yang terbuka bagi publik;
 - f. Memajukan bentuk-bentuk bantuan dan dukungan lainnya untuk masyarakat penyandang disabilitas untuk memastikan akses memperoleh informasi;

- g. Memajukan akses bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh teknologi dan sistem informasi dan komunikasi terbaru, termasuk Internet;
- h. Memajukan rancangan, pembangunan, produksi dan distribusi teknologi dan sistem informasi dan komunikasi yang dapat diakses sejak dini, sehingga teknologi dan sistem ini dapat diakses dengan biaya minimum.

Dalam kaitannya dengan pemilu, menurut Afifuddin, Manajer Program JPPR-AGENDA (*General Election Network for Disability Access*), aksesibilitas adalah “suatu kondisi dimana setiap warga negara bisa menggunakan hak politiknya (memilih, dipilih, dan diangkat sebagai penyelenggara Pemilu) secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta mandiri tanpa hambatan apapun”. Adapun berkaitan dengan kaum difabel, aksesibilitas adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses pemilu.²⁵

Hal itu semua jelas telah dijamin oleh poin-poin yang ada dalam pasal 9 diatas mengenai aksesibilitas. Ini adalah pasal yang sangat penting untuk memajukan akses pemilu bagi kaum difabel karena memberikan pedoman konkrit untuk memastikan bahwa pemilu-pemilu yang dilaksanakan dapat diakses kaum difabel sekaligus mendorong penggunaan teknologi yang dapat membantu kaum difabel pada saat berpartisipasi dalam pemilu.

²⁵ M. Afifuddin, “Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu”, (Makalah dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections*, Jakarta, 22-24 April 2014)

Adapun pasal 29 mengenai hak partisipasi dalam kehidupan politik dan publik memuat tentang kewajiban negara untuk mewujudkan hak kaum difabel dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar dimana salah satunya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu. Selengkapnya pasal ini berbunyi sebagai berikut :²⁶

Negara-Negara Pihak harus menjamin kepada penyandang disabilitas hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya dan akan mengambil langkah-langkah untuk:

- a. Menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih, antara lain dengan:
 - i. Memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses serta mudah dipahami dan digunakan;
 - ii. Melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan serta melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan, dengan memanfaatkan penggunaan teknologi baru yang dapat membantu pelaksanaan tugas;

²⁶ Pusat Pemilihan Umum Akses–Difabel Cacat (PPUA-PENCA), *Buku Panduan Akses Pemilu*, 7.

- iii. Menjamin kebebasan berekspresi dan keinginan penyandang disabilitas sebagai pemilih dan untuk tujuan ini, bilamana diperlukan atas permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang ditentukan mereka sendiri.
- b. Secara aktif mengembangkan lingkungan dimana penyandang disabilitas secara efektif dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan bermasyarakat, tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan atas azas kesetaraan dengan warga negara lain, serta mendorong partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk diantaranya:
 - (i) Partisipasi dalam kegiatan organisasi-organisasi dan asosiasi-asosiasi non pemerintah yang bergerak di bidang kehidupan bermasyarakat dan berpolitik negara serta dalam berbagai kegiatan dan administrasi partai-partai politik;
 - (ii) Membentuk dan bergabung dengan organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk mewakili kaum penyandang disabilitas di tingkat internasional, nasional, regional dan daerah.

Landasan hukum sebagaimana pasal diatas kemudian dijabarkan melalui UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 misalnya, pada pasal 157 disebutkan bahwa pemilih tunanetra, tunadaksa, dan yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu orang lain atas permintaan pemilih. Selain itu pada pasal 142

penjelasan ayat 2 tercantum ketentuan tentang salah satu perlengkapan pemungutan suara yakni alat bantu tunanetra. Hanya saja dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut dinilai belum cukup mampu memberikan jaminan kesetaraan hak bagi kaum difabel.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu sangatlah penting dilakukan dalam sebuah penelitian. Selain sebagai bahan komparasi dan referensi, penelitian-penelitian terdahulu juga bertujuan untuk memetakan posisi penelitian yang dilakukan dihadapan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Terkait dengan literasi politik kaum difabel dalam pemilu, untuk di Banjarnegara sendiri belum ditemukan penelitian tentang persoalan ini. Jadi masih merupakan satu penelitian yang baru. Bahkan penelitian tentang partisipasi politik kaum difabel secara umum juga belum ada. Oleh karena itu, penelitian terdahulu yang dikemukakan dan digunakan sebagai komparasi diambilkan dari studi kasus yang diteliti di daerah lain.

Terdapat dua penelitian yang ditemukan terkait tema ini. *Pertama*, penelitian dari Sarah Sausan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2013 yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di Kota Medan dan untuk mengetahui apa-apa saja kendala dalam pelaksanaan pemenuhannya tersebut. Penelitian dikhususkan kepada penyandang

disabilitas fisik, yaitu tunanetra dalam pemenuhan hak-haknya sebagai pemilih dalam pemilihan umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak kaum difabel dalam pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013 di kota Medan sudah terselenggara dengan cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya meliputi tidak terdapatnya basis data pemilih difabel, kurangnya sosialisasi, kurangnya akurasi data dan tidak adanya sanksi hukum yang tegas dalam peraturan jika terjadi pelanggaran hak-hak kaum difabel dalam pemilu. Dalam melakukan penelitian tersebut, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data *field research* dan *library research*.²⁷

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat) pada tahun 2014, yang telah dijadikan buku berjudul “Potret Pemilu Akses Dalam Pilpres 2014”. Penelitian ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan pemilu akses pada Pilpres 2014. Pemantauan Pemilu Akses dilakukan di 5 provinsi di Indonesia (Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Nangroe Aceh Darussalam). Temuan utama penelitian ini adalah pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi kaum difabel dalam pilpres 2014 masih menjadi masalah pokok yang menciptakan kendala bagi kaum difabel dalam menyalurkan aspirasi politiknya pada saat Pemilu. Selain itu, walaupun beberapa peraturan sudah secara jelas mengatur tentang partisipasi kaum difabel dalam Pemilu, namun demikian dalam praktiknya di lapangan masih

²⁷ Sarah Sausan H, “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kota Medan” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013)

banyak mengalami hambatan. Penelitian ini menggunakan *checklist* (daftar periksa) dan survei pasca pemilu sebagai instrumen pengambilan data pemantauan.²⁸

Dari deskripsi dua penelitian terdahulu tersebut, jelas terlihat bahwa penelitian tentang literasi politik kaum difabel dalam pemilu ini sangat signifikan untuk dilakukan. Sebab, topik ini secara khusus belum ditelaah oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Baik penelitian pertama maupun kedua, sama-sama mengulas tentang pemenuhan aksesibilitas pemilu bagi kaum difabel secara umum. Sementara penelitian literasi politik yang dilakukan ini membahas secara lebih spesifik tentang akses informasi politik kaum difabel dalam pemilu. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan ini ditinjau dari segi *positioning*-nya terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengandung unsur kebaruan dan relatif orisinal.

²⁸ JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat), *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia* (Jakarta: JPPR, 2014)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan paradigmanya, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh)²⁹.

Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan agar data-data yang didapatkan lebih lengkap dan mendalam, sebab metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.³⁰

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Sebuah tipe pendekatan dalam penelitian berdasarkan suatu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetil dan komprehensif.³¹ Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenan dengan “*how*” atau “*why*” dan bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki dan

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007), 4.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), 1.

³¹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta :Rajawali Pers, 1999), 22.

bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer di dalam konsep kehidupan nyata.³² Penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam tentang kasus yang akan diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti berharap dapat mendeskripsikan fenomena, keteraturan dan kekhususan tentang kasus yang akan diteliti.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

3.4 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian merupakan satuan analisis yang dituju dari suatu penelitian. Adapun sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Aktivis/Pegiat Organisasi Difabel Tunanetra di Banjarnegara;
- 2) Difabel Tunanetra dari kalangan masyarakat biasa
- 3) Komisioner KPU Banjarnegara
- 4) Relawan Demokrasi KPU yang bertugas pada komunitas tunanetra

3.5 Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan tujuan untuk merinci kekhususan ke dalam temuan konteks yang unik, dan menggali informasi yang menjadi dasar rancangan dan teori yang muncul.³³

³² Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 1.

³³ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 224.

Dalam hal ini, peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui masalahnya secara mendalam³⁴. *Purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subyek penelitian dan bukan didasarkan pada strata, random atau daerah, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu³⁵. Dengan demikian, pemilihan informan tidak dilakukan secara kuantitas tetapi dilakukan secara kualitas dari pemahaman narasumber terhadap masalah yang akan diteliti.

3.6 Profil Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan utama dan informan pembanding. Informan utama berfungsi untuk memberikan informasi-informasi yang ingin diketahui peneliti. Sedangkan informan pembanding berfungsi untuk triangulasi data. Informan utama adalah komunitas difabel tunanetra baik yang bergiat dalam organisasi difabel maupun masyarakat biasa. Sedangkan informan pembandingnya adalah Komisioner KPU Kabupaten Banjarnegara dan Relawan Demokrasi KPU yang bertugas pada komunitas difabel tunanetra.

Tabel 1. Profil Informan Penelitian

No	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan	Jabatan/Profesi
1	Ali Ujang	Laki-laki	47	SD	Ketua Pertuni /Tukang Pijat
2	Nasrun	Laki-laki	64	SD	Ketua Putrabara /Tukang Pijat
3	David	Laki-laki	28	SMP	Pengurus

³⁴ Heribertus Sutopo, *Pengantar Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1988), 21-22.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"* (Jakarta :Rineka Cipta, 2002), 117.

	Mustofa				Pertuni/Tukang Pijat
4	Usman Junaedi	Laki-laki	38	SD	Wiraswasta/ Pegiat Difabel
5	Neni Lailiyah	Perempuan	47	SMP	Ibu Rumah Tangga
6	Sunarti	Perempuan	38	SD	Ibu Rumah Tangga
7	Hadriati	Perempuan	32	Tidak Sekolah	Tukang Pijat
8	Muharjo	Laki-laki	65	Tidak Sekolah	Tidak Bekerja
9	Khuswatun Chasanah	Perempuan	34	S1	Komisioner KPU Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM
10	Iwan Tri Setiawan	Laki-laki	42	S1	Relawan Demokrasi KPU dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Banjarnegara

3.7 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan untuk mengumpulkan keterangan maupun informasi diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas. Data ini menggunakan teknik wawancara dengan para informan dan observasi. Data sekunder adalah data sumber tidak langsung yang berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁶

3.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

³⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 36.

- 1) Wawancara mendalam adalah wawancara informal yang dilakukan pada saat konteks dianggap tepat, guna mendapatkan data yang mempunyai kedalaman dan dapat dilakukan berkali-kali secara frekuentif sesuai dengan kemampuan peneliti. Teknik ini bertujuan agar peneliti mampu mengeksplorasi data dari informan³⁷.
- 2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengamati secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis dan memahami segala hal yang berhubungan dengan obyek penelitian, serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi-kondisi sebenarnya yang terjadi dilokasi penelitian baik secara formal maupun non-formal.
- 3) Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁸ Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengambil dan mencatat data yang berasal dari dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting yang berhubungan dengan studi kasus yang akan diteliti oleh peneliti.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema

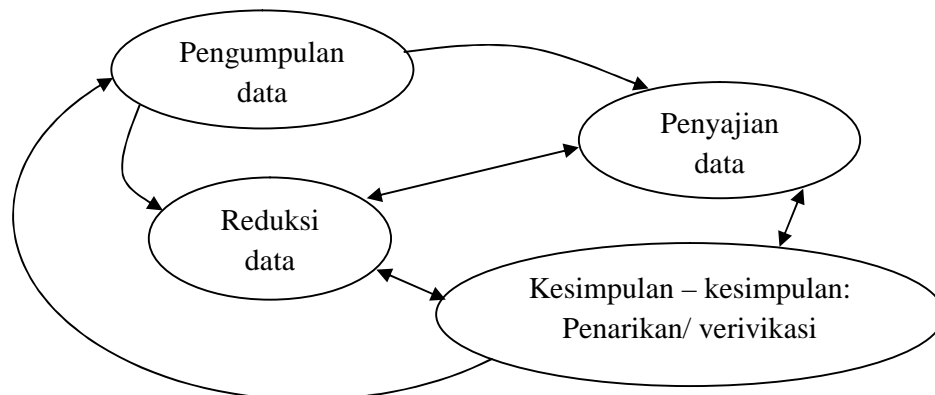
³⁷ Mathew B Miles dan A. Michael Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI-Press, 1992), 15.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2010), 149.

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data³⁹. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*). Proses analisis interaktif dilakukan selama penelitian. Didalam analisis interaktif, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi⁴⁰. Adapun prosesnya apabila digambarkan tersaji dalam gambar berikut ini :

Gambar 1

Model Analisis Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman (1992)

Penjelasan langkah – langkahnya adalah sebagai berikut:

1). Pengumpulan data :

Pengumpulan data merupakan proses awal dari keseluruhan rangkaian analisis data, yaitu berupa kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan penelitian, baik itu berupa wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Pada tahap ini data – data

³⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103

⁴⁰ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 15

yang diperoleh tersebut telah disusun secara teratur dalam bentuk kata – kata yang sangat banyak sebelum akhirnya dianalisis. Agar mempermudah dalam menganalisis, satu per-satu perlu dipilah – pilah kembali untuk memperoleh mana data yang relevan dan mana yang tidak. Oleh karena itu diperlukan langkah berikutnya yaitu reduksi data.

2). Reduksi data :

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis dilapangan. Dengan demikian, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan – kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3). Penyajian data :

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian – penyajian, dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan yakni lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian – penyajian data tersebut.

4). Penarikan kesimpulan :

Kegiatan mencari arti benda – benda, mencatat keteraturan, pola – pola, penjelasan, konfigurasi – konfigurasi yang mungkin, alur sebab – akibat dan preposisi kemudian mengikat lebih rinci serta mengakar dengan kuat.

3.10. Validitas Data

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam menguji keabsahan data yang dikumpulkan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan atau sebagai pembanding terhadap hal itu⁴¹. Penelitian ini menggunakan triangulasi yang memanfaatkan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dilakukan dengan cara :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- 2) Membandingkan paparan yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu;
- 3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang; dan
- 4) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan permasalahan.

⁴¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Difabel Tunanetra di Banjarnegara

Data yang akurat tentang jumlah kaum difabel di Kabupaten Banjarnegara sulit untuk ditemukan. Data terkini yang disampaikan oleh pejabat terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah sejumlah 5.757 yang terdiri dari difabel anak usia 0 sampai 18 tahun sebanyak 1.216 jiwa serta difabel dewasa sebanyak 4.541 jiwa.⁴² Namun demikian, berdasarkan *record* data daftar penyandang disabilitas di Kabupaten Banjarnegara yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 ternyata jumlah keseluruhan kaum difabel di Kabupaten ini setelah direkapitulasi adalah 3.954 orang.

Persoalan seperti ini bukan hanya terjadi di Banjarnegara tetapi hampir merata di seluruh Indonesia. Sangat boleh jadi perbedaan-perbedaan data jumlah difabel ini dikarenakan oleh perubahan data disabilitas dari indikator kesehatan menjadi indikator kesejahteraan sosial serta berubah-ubahnya definisi operasional mengenai disabilitas oleh instansi pemerintah di Indonesia.⁴³

Dari 3.954 orang difabel di Banjarnegara tersebut, kaum difabel tunanetra menempati urutan kedua terbanyak dari segi jumlah, yakni sebanyak 775 orang

⁴² Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Dwi Suryanto pada peringatan hari disabilitas internasional ke 22 dan kegiatan pendayagunaan para difabel cacat dan eks trauma tahun 2014 di Pendopo Dipayuda Adigraha Kamis 18 Desember 2014. "Penyandang disabilitas Butuh Fasilitas Untuk Mandiri," Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, diakses 30 Mei 2015, 5 <http://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/sosial-budaya/2300-difabel-disabilitas-butuh-fasilitas-untuk-mandiri>

⁴³ Sausan H, "Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas".

(19,60%). Adapun peringkat teratasnya adalah para difabel tubuh atau tunadaksa sejumlah 1171 orang (29,62%). Sementara itu, para difabel yang jumlahnya paling sedikit adalah kaum difabel fisik dan mental sebanyak 12 orang (0,3%). Adapun data kedifabelan pada jenis lainnya adalah sebagai berikut: difabel pendengaran dan gangguan untuk berbicara (bitul) 610 orang (15,43%), gangguan pada mental atau tunagrahita 443 orang (11,20%), difabel Laras 425 orang (10,75%), difabel ganda 271 orang (6,85%) eks psiko 181 orang (4,58%) dan lain-lain sebanyak 66 (1,67%). Secara lebih detil data rekapitulasi jumlah kaum difabel di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara

No	Jenis Kecacatan	Jumlah	Persentase
1	PC Ganda	271	6,85%
2	PC Laras	425	10,75%
3	PC Grahita	443	11,20%
4	PC Bitul	610	15,43%
5	PC Netra	775	19,60%
6	PC Tubuh	1171	29,62%
7	PC Eks Psiko	181	4,58%
8	PC Fisik & Mental	12	0,30%
9	Lain-lain	66	1,67%
	Total	3.954	100%

Sumber : Daftar Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banjarnegara dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tahun 2015. Data telah diolah kembali.

Terkait dengan kaum difabel tunanetra, populasinya tersebar di hampir semua kecamatan yang ada. Dari dua puluh kecamatan hanya ada tiga kecamatan yang tidak ada difabel tunanetranya yakni Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Madukara dan Kecamatan Pagedongan. Hal ini bukan berarti memang sama sekali tidak ada populasi tunanetra di kecamatan-kecamatan tersebut. Ada kemungkinan

mereka belum terdata atau *record* data yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi (Disnakertransos) memang belum lengkap. Sementara itu, kecamatan yang memiliki populasi tunanetra terbanyak adalah Kecamatan Bawang dengan jumlah tunanetra sebanyak 98 orang, disusul dengan Kecamatan Banjarnegara sejumlah 71 orang. Jika dipersentasekan jumlah tunanetra di Kecamatan Bawang adalah 12,6% dan di Kecamatan Banjarnegara 9,1% dari keseluruhan tunanetra di Banjarnegara

Data rekapitulasi jumlah kaum difabel tunanetra di 20 Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Kaum Difabel Tunanetra Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Tunanetra	Jenis Kelamin	
			Perempuan	Laki-laki
1	Susukan	61	32	29
2	Purwareja Klampok	3	2	1
3	Mandiraja			
4	Purwonegoro	68	29	39
5	Bawang	98	45	53
6	Banjarnegara	71	42	29
7	Sigaluh	50	21	29
8	Madukara			
9	Banjarmangu	65	31	34
10	Wanadadi	45	16	29
11	Rakit	53	16	37
12	Punggelan	4	2	2
13	Kr.Kobar	1	1	
14	Pagentan	64	30	34
15	Pejawaran	41	18	23
16	Batur	56	31	25
17	Wanayasa	70	32	38
18	Kalibening	3	1	2
19	Pandanarum	22	6	16
20	Pagedongan			
	Total	775	355	420

Sumber : Daftar Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banjarnegara dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Tahun 2015. Data telah diolah kembali.

Berdasar tabel diatas dari sisi jenis kelamin kaum difabel laki-laki di Kabupaten Banjarnegara lebih banyak (420 orang) dari pada kaum difabel perempuan (355 orang). Sayangnya, data dari Dinsosnakertrans ini tidak cukup lengkap karena tidak memuat mengenai data kaum difabel berdasarkan profesi, tingkat pendidikan maupun keterampilan utama yang dimiliki. Sehingga, data mengenai hal tersebut tidak dapat ditampilkan dalam gambaran umum kaum difabel tunanetra pada penelitian ini.

4.2 Organisasi Difabel Tunanetra di Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan informasi dari KPU Kabupaten Banjarnegara terdapat dua organisasi difabel tunanetra di Banjarnegara yakni Pertuni dan Putrabara. Berikut adalah profil singkat dari kedua organisasi tersebut.

4.2.1 Pertuni

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) adalah organisasi kemasyarakatan tunanetra Indonesia yang berdiri pada tahun 1966. Pertuni didirikan oleh sekelompok difabel tunanetra dengan tujuan mewujudkan keadaan yang kondusif bagi orang tunanetra untuk menjalankan kehidupannya sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang cerdas, mandiri dan produktif tanpa diskriminasi dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Pertuni merupakan organisasi tingkat nasional yang mempunyai struktur kepengurusan tingkat Pusat di Ibu Kota Negara RI, tingkat Daerah di wilayah Propinsi, dan tingkat Cabang di wilayah

Kota/Kabupaten. Berdasarkan data sampai Oktober 2011, anggota Pertuni berjumlah lebih dari dua puluh ribu orang. Mereka terorganisasikan dalam 29 Pertuni Daerah dan 167 Pertuni Cabang, yang berjuang untuk kepentingan lebih dari dua juta orang tunanetra di seluruh Indonesia.⁴⁴

Di Kabupaten Banjarnegara, Cabang Pertuni⁴⁵ berdiri pada tahun 2002 dengan pendiri Turyanto beserta istri, Darsun beserta istri, Ali Ujang, Syahid, Waluyo dan Jawari. Pertuni di Banjarnegara pada awalnya didirikan sebagai ajang silaturahmi antara sesama kaum tunanetra khususnya serta sebagai upaya untuk mengangkat harkat dan martabat kaum tunanetra agar didalam masyarakat tidak dipandang sebelah mata. Yakni melalui upaya-upaya pemberdayaan. Ketua Pertuni saat ini adalah Ali Ujang. Pertuni beralamatkan di Jalan Cokroaminoto Banjarnegara.

Pertuni Banjarnegara memiliki empat bidang yang menjadi garapan yaitu bidang pendidikan, bidang kesejahteraan, bidang konsolidasi dan bidang kemitraan. Anggota Pertuni kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan profesi rata-rata sebagai tukang pijat. Kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh DPC Pertuni Kabupaten Banjarnegara adalah kegiatan rutin seperti pertemuan pengurus, pertemuan anggota setiap bulan, mengikuti kegiatan dari pengurus DPD Pertuni dan merayakan peringatan hari disabilitas. Dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan biasanya juga dilakukan kegiatan arisan dan simpan pinjam.

⁴⁴ "Selamat Datang di situs Web Pertuni," Pertuni, diakses 3 Juni 2014, <http://pertuni.idp-europe.org/>

⁴⁵ Ali Ujang, wawancara oleh peneliti, Sekretariat Pertuni, 23 Juni 2015. Profil singkat Pertuni Cabang Banjarnegara ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan bersangkutan yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Pertuni Banjarnegara.

4.2.2 Putrabara

Persatuan Tunanetra Banjarnegara (Putrabara) adalah organisasi para difabel tunanetra yang lingkupnya hanya di tingkat Kabupaten Banjarnegara.⁴⁶ Oleh karena itu, Putrabara bukan merupakan cabang dari organisasi tunanetra tingkat nasional. Organisasi ini berdiri sejak 1996. Jadi, dari segi kelembagaan lebih dulu ada dibanding Pertuni Banjarnegara. Sebagian besar anggotanyapun lebih tua dari segi usia daripada anggota-anggota Pertuni.⁴⁷ Pendirinya adalah Nasrun beserta 7 orang difabel tunanetra lainnya. Nasrun telah menjadi ketua organisasi difabel ini dari sejak didirikan sampai saat ini. Putrabara beralamatkan di Desa Mantrianom Rt. 03/RW.03, Bawang, Banjarnegara.

Tujuan awal organisasi ini adalah mengikat tali persahabatan antara tunanetra di Banjarnegara. Adapun kegiatan pokoknya pertemuan rutin dengan agenda silaturahmi, arisan dan simpan pinjam. Putrabara memiliki misi mendorong para tunanetra agar gesit bekerja keras dalam mencari penghidupan sehingga dari sisi ekonomi bisa berdaya dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga.

Saat ini anggota aktifnya mencapai 30 orang dengan profesinya rata-rata sebagai tukang pijat. Yang dimaksudkan dengan anggota aktif adalah mereka yang setiap sebulan sekali ikut dalam kegiatan pertemuan rutin pada Hari Minggu di minggu yang terakhir. Kegiatan pijat diambil sebagai profesi mereka pada umumnya karena dinilai lebih memberikan nilai ekonomis yang memadai

⁴⁶ Nasrun, wawancara oleh peneliti, Sekretariat Putrabara, 23 Juni 2015. Deskripsi singkat mengenai Putrabara ini disusun berdasarkan hasil wawancara dengan informan bersangkutan yang juga menjabat sebagai Ketua Putrabara.

⁴⁷ Khuswatun Chasanah wawancara oleh peneliti, Kantor KPU Banjarnegara, 9 Juni 2015. Informan adalah Komisioner KPU Banjarnegara, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan SDM.

dibandingkan dengan profesi lain seperti perajin keset atau kasur yang secara ekonomi tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup mereka sekeluarga.

4.3 Temuan dan Pembahasan

4.3.1 Kondisi Literasi Politik Pemilih Tunanetra

Literasi politik yang berupaya digali melalui penelitian ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam landasan teori, dibatasi pada aspek pengetahuan politik. Untuk dapat memahami pengetahuan politik difabel tunanetra, maka beberapa hal dasar yang terkait dengan pelaksanaan pemilu 2014 digali dari pemahaman kaum difabel tunanetra. *Pertama*, pemahaman tentang arti pemilu baik pemilu legislatif yang dari sisi pelaksanaannya cukup rumit dimana informan harus memilih tiga tingkatan anggota dewan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) ditambah dengan DPD dan pemilu presiden. *Kedua*, pengetahuan mereka terhadap partai-partai yang mengikuti pemilu 2014. *Ketiga*, pengenalan mereka terhadap calon atau kandidat. *Keempat*, dialami pula tentang pemahaman informan mengenai profil calon yang dipilih. *Kelima*, pengetahuan mereka tentang program yang ditawarkan calon. *Keenam*, pandangan mereka tentang praktik politik uang dalam pemilu. Untuk melengkapi ulasan tentang aspek kognisi ini, para difabel tunanetra ini juga dimintai pendapatnya sejauh mana pengetahuan mereka tentang hak-hak kaum difabel dalam pemilu yang tercantum dalam *Convention on the Right Persons With Disabilities (CRPD)* yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011.

4.3.1.1 Pemahaman Tentang Pemilu

Kemelekan politik yang paling mendasar terkait dengan pemilu bisa dilihat dari pemahaman para pemilih tentang arti pemilu itu sendiri. Secara umum para difabel tunanetra di Kabupaten Banjarnegara dalam penelitian ini telah mengetahui makna dari Pemilu Anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan rakyat daerah) yakni untuk memilih anggota dewan yang akan mewakili mereka pada skup wilayah yang berbeda (pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Anggota-anggota dewan ini dianggap sebagai perwakilan mereka yang bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi rakyat kepada pemerintah. Mereka juga mengetahui bahwa calon-calon yang ada dalam pemilu Anggota DPR dan DPRD diusung oleh partai-partai politik.

Namun demikian, untuk pemilu DPD (Dewan Perwakilan Daerah) hampir semua informan secara eksplisit tidak memahami hakekatnya. Mereka tidak mengerti pemilu DPD itu untuk memilih siapa dan lembaga DPD mewakili apa. Para difabel tunanetra ini bisa dikatakan hampir semua betul-betul tidak mengetahui DPD dari segi kelembagaan. Hanya ada satu informan yang berusaha untuk memberikan penjelasan tentang DPD. Hanya saja uraian yang disampaikan oleh pegiat difabel ini meski telah menyentuh sebagian substansi, tampak belum sepenuhnya meyakinkan:

Lah kalau DPD, iya itu setahu saya DPD itu untuk seperti apa yah mengepalai apa istilahnya membawahi Jawa Tengah tapi bukan gubernur. Tapi apa yah istilahnya, iya wakil rakyat yang skupnya apa yah istilahnya instansi yang membawahi daerah provinsi.⁴⁸

⁴⁸ Usman Junaidi, wawancara oleh peneliti, rumah informan, 9 Juni 2015. Informan ini adalah seorang pegiat difabel yang pernah menjadi Ketua Pertuni. Sebagai aktivis, ia telah sering mengikuti beragam sosialisasi dan workshop yang diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun NGO termasuk didalamnya workshop terkait dengan CRPD (*Convention on the Right Persons With Disabilities*).

Sedangkan mengenai pemilu presiden, tidak ditemukan persoalan pemahaman dari para difabel tunanetra ini.

4.3.1.2 Pengenalan Terhadap Partai-Partai Peserta Pemilu

Adapun terkait dengan partai-partai yang ikut dalam pemilu, para difabel tunanetra ini telah mengetahui partai-partai peserta pemilu 2015 meskipun tidak lengkap. Saat diminta menyebutkan keseluruhan partai peserta pemilu yang lalu tidak ada yang bisa memberikan jawaban secara utuh 12 (dua belas) partai peserta pemilu tersebut. Pengenalan mereka terhadap partai-partai beragam. Terdapat informan yang hanya tahu 3 (tiga) partai.⁴⁹ Ada pula informan yang hampir mengetahui semua partai. Partai-partai yang sudah cukup lama ada, lebih banyak dikenal oleh para difabel tunanetra daripada partai-partai yang relatif baru. Misalnya Golkar, PPP dan PDIP. Jawaban yang paling mendekati adalah dari informan yang dapat menyebutkan 11 (sebelas) partai:

Iya hampir tahu semua, iya ada PDI, ada PAN, ada Golkar, ada PPP, ada PKB, ada NASDEM, ada PKS, ada HANURA, GERINDRA terus DEMOKRAT terus ada lagi Partai Bulan Bintang atau PBB⁵⁰

Ketidakmampuan menyebutkan keseluruhan partai peserta pemilu bukan berarti kemudian diantara mereka tidak ada yang memahami karakter dan dinamika parta-partai yang ada. Informan berikut bahkan dapat mengaitkan partai-partai yang ada dengan koalisi-koalisi yang terbentuk:

Iya ngertos. Lah niku koalisine merah putih iya, lah koalisine Prabowo loh, koalisine Jokowi iya koalisi Indonesia hebat. Nggeh ngerti niku satu persatune partai. Ngertine iya saking berita, ora

⁴⁹ Hadriati, wawancara oleh peneliti, rumah informan, 9 Juni 2015. Informan seorang yang berprofesi sebagai tukang pijat, tidak pernah memasuki sekolah formal, namun pernah mengikuti pendidikan pijat. Ia juga tidak tergabung aktif dalam organisasi difabel tunanetra yang ada.

⁵⁰ Junaidi.

*warga nang desa nidokna maring kulo niku mboten. Kulo ngertine saking berita, nggeh.*⁵¹

(Iya tahu. Itu koalisi merah putih adalah koalisinya Prabowo, Koalisinya Jokowi iya koalisi Indonesia hebat. Ya, tahu satu persatunya partai. Tahunya ya dari berita bukan dikasih tahu warga desa. Saya tahunya dari berita, ya).

4.3.1.3. Pengenalan Terhadap Calon

Terkait dengan pengenalan terhadap calon-calon legislatif pada pemilu yang lalu, para difabel tunanetra memiliki pengetahuan yang terbatas. Sejumlah besar mereka tidak mengenal para caleg yang diusung partai-partai dalam pemilu DPR dan DPRD.⁵² Sementara sebagian informan hanya mengenal setidaknya beberapa dari caleg tersebut.

Kalau mengenal secara dekat sih nggak, beberapa iya ada lah, beberapa kalau untuk kabupaten. Kalau untuk kabupaten mengenal secara dekat ada tapi kan ya, kita nggak tahu posisinya dia dimana dalam arti nomor berapa, kita hanya tahu mendengarkan saya partainya ini nomornya ini sekian. Saya calon legislatif nomor sekian, tapi kan kita untuk mencari itu tetep kesulitan, kaya gitu.⁵³

Untuk pemahaman terhadap calon DPD, semua informan tidak ada yang mengenal satupun nama calon-calon DPD. Adapun terkait dengan calon-calon presiden, semua difabel tunanetra dalam penelitian ini menyatakan mengetahui calon-calon yang berlaga, yakni ada Prabowo- Hatta dan Jokowi- JK. Hanya saja

⁵¹ Nasrun, 9 Juni 2015. Pada kesempatan ini wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa.

⁵² Para difabel tunanetra yang tidak tergabung dalam organisasi difabel semuanya tidak mengenal calon-calon DPR dan DPRD. Termasuk didalamnya informan Sunarti, seorang Ibu rumah tangga yang berpendidikan SD. Apalagi informan Muharjo yang selain tunanetra juga mengalami kelumpuhan sehingga akses informasinya sangat terbatas. Wawancara oleh peneliti, rumah informan, 9 Juni 2015. Adapun mereka yang terlibat aktif dalam organisasi difabel setidaknya dapat menyebutkan meskipun hanya sedikit nama dari caleg-caleg tersebut. Wawancara oleh peneliti, rumah informan, 9 Juni 2015.

⁵³ Junaidi.

tidak semua mengetahui partai-partai yang menjadi pengusung calon presiden tersebut.

4.3.1.4. Pengetahuan Tentang Profil Calon

Karena tingkat pengenalan yang rendah terhadap calon anggota DPR, DPRD dan DPD, informan juga tidak dapat memberikan deskripsi profil dari calon yang dipilihnya. Sedangkan terkait calon presiden, para difabel tunanetra ini mengenal calon-calon yang bersaing. Pemahamannya juga beragam, dari yang kurang mampu menyampaikan deskripsi profil calon⁵⁴, hanya sedikit tahu profilnya, cukup tahu, sampai yang menggunakan rekam jejak calon presiden sebagai bahan pertimbangan memilih. Pernyataan empat difabel tunanetra ini saat digali pendapatnya tentang profil capres dapat dijadikan perbandingan.

Nggak tahu.⁵⁵

Iya nggak terlalu paham banget gitu.... Tahunya saya itu dia jadi jenderal kayak gitu⁵⁶

Kalau pilpres kemarin milih Prabowo, alesannya dia kan jenderal, kalo jenderal kan segala sesuatunya kedisplinanya lebih tegas, kalo Jokowi kan orangnya sederhana dan orang Indonesia mayoritas sukanya orang yang sederhana, jadi pada milihnya Jokowi. Kalo kasusnya yang pernah menimpa Prabowo pada tahun 1998 malah tidak tahu⁵⁷

Pak Prabowo saya tahu dia seorang jendral namun saya juga sering mendengar cerita bahwa jendral itu nggak ada yang bersih iya kaya gitu. Sementara kalau Pak Jokowi walaupun orang pada bicara apa, wah Pak Jokowi belum saatnya belum ini belum itu tapi saya sudah

⁵⁴ Informan Sunarti, Hadriati dan Muharjo, meskipun mengenal nama capres, akan tetapi kurang mampu menyampaikan deskripsi tentang profilnya, ketiganya tidak tergabung aktif dalam organisasi difabel.

⁵⁵ Sunarti

⁵⁶ Neni Lailiyah, wawancara oleh peneliti, rumah informan, 9 Juni 2015. Informan adalah Ibu Rumah Tangga berpendidikan SMP, tidak tergabung aktif dalam organisasi difabel.

⁵⁷ Nasrun, 23 Juni 2015. Jika pertemuan sebelumnya menggunakan bahasa Jawa pada pertemuan ini komunikasi menggunakan Bahasa Indonesia.

bisa melihat Pak Jokowi berhasil di Solo terus ketika ia menjabat di Jakarta belum selesai tapi sudah ada perubahan disana. Ada *track record* yang jelas ada kinerja yang jelas. Iya walaupun saya belum pernah lihat kiprahnya jadi presiden tapi saya juga penasaran. Akhirnya yah jujur saja kemarin saya memilih Pak Jokowi bukannya maksudnya kami itu tidak percaya pada Pak Prabowo tapi yak karena permasalahan itu. Jujur saja kalau nama besarnya sebenarnya Pak Prabowo itu lebih apa yah negarawan. Dia seorang jenderal yang nasionalis. Tapi ya, lah itu tadi kami sering dengar, sudah pernah sering dengar nggak cuma satu dua kali berita bahwa yang namanya jenderal masa lalu itu, kroni-kroninya Pak Soeharto itu kan nggak ada yang bersih lah. Jujur saja itu saya sering dengar seperti. Bicara kan bebas iya mas yah hehe. Itu yang saya tahu gitu loh.⁵⁸

4.3.1.5. Pengetahuan Tentang Program yang Ditawarkan

Sedangkan terkait program yang ditawarkan calon, relatif sama dengan masalah profil, para difabel tunanetra tidak dapat menerangkan program dari calon DPR, DPRD maupun DPD. Untuk program calon presiden secara umum hanya diketahui secara sepintas-sepintas.⁵⁹ Seperti yang diungkapkan seorang difabel tunanetra berikut: “Ya nggak ini banget sih, sekilas sekilas saja”.⁶⁰

Hanya sedikit orang yang memiliki pemahaman yang memadai, seperti komentar seorang informan ini:

Salah satu contoh program yang ditawarkan itu dia kepingin memperkuat ketahanan di negara ini dari *illegal logging* dan memperkuat maritim. Kalau itu salah satunya sudah terbukti. Ada memang seperti berita itu penenggelaman kapal-kapal asing walaupun kami belum dengar penenggelaman kapal-kapal yang super. Baru kapal-kapal kecil.⁶¹

4.3.1.6. Pandangan Terhadap Politik Uang

⁵⁸ Junaidi.

⁵⁹ Hampir sama dengan pengetahuan tentang profil calon, kualitas pengetahuan mengenai program calon juga cukup jauh berbeda antara para difabel yang terlibat aktif dalam organisasi dan yang tidak memiliki keterlibatan aktif.

⁶⁰ Hadriyati

⁶¹ Junaidi

Terkait dengan politik uang (*money politics*), sejumlah difabel tunanetra mengaku ditawarkan politik uang menjelang pemilihan legislatif. Hanya saja untuk pilpres tidak ada pihak yang menawarkan. Namun, sebagian besar difabel tunanetra mengaku tidak ditawarkan politik uang. Diantara mereka yang ditawarkan mayoritas tidak mau menerima. Bagi informan yang menerima, pemberian uang dianggap sebagai rezeki dan menjadi hal wajar untuk diterima. Pandangan seperti ini, tidak bisa secara sederhana kemudian dikategorikan sebagai sikap yang permisif, sebab dalam hal pilihan, informan tersebut menegaskan tidak akan terpengaruhi. Lebih lanjut, informan ini memberikan penilaiannya terhadap politik uang bahwa “politik uang akan menjurus kepada hal-hal yang negatif, salah satunya yaitu korupsi karena untuk pengembalian modal kampanye”.⁶²

Bahwa politik uang akan memicu korupsi sebagaimana pandangan diatas, ternyata telah meluas dipahami oleh para difabel tunanetra baik yang ditawarkan politik uang maupun yang tidak. Walaupun mereka tidak ditawarkan, namun secara tegas mereka mengatakan penolakannya terhadap politik uang. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai uang haram.

Kalau saya katanya kan nggak boleh, itu haram. Udah nggak pengen gitu, klo katanya milih ini dikasih, nggak pengen gitu. Saya pengennya betul-betul milih karena niatnya pengen perbaikan lah gitu.⁶³

4.3.1.7. Pengetahuan Tentang Hak Politik Difabel dalam Pemilu

⁶² David Mustofa, wawancara oleh peneliti, Sekretariat Pertuni, 9 Juni 2015. Informan adalah salah satu pengurus inti Pertuni dan berprofesi sebagai pemijat.

⁶³ Lailiyah.

Salah satu instrumen legal internasional yang menjamin hak-hak politik kaum difabel adalah Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi ini jika dipahami dengan baik dapat digunakan sebagai instrumen bagi para difabel tunanetra terutama dalam hal mendorong negara memenuhi kewajibannya dalam melindungi hak-hak kaum difabel untuk berpartisipasi dalam politik dan kehidupan bermasyarakat.

Sayangnya, sedikit sekali difabel tunanetra yang mengetahui secara mendalam hak-hak politik mereka berkaitan dengan partisipasi dalam kehidupan politik dan bermasyarakat termasuk didalamnya pemilu yang dijamin oleh CRPD. Padahal konvensi ini sangat penting bagi mereka karena memastikan agar para difabel benar-benar memiliki akses yang efektif ke proses-proses politik. Bahkan banyak yang sama sekali tidak tahu tentang CRPD.⁶⁴ Dari sedikit yang tahu ini, bagian yang mereka sebutkan, sebagian besar terkait dengan hak-hak yang berkaitan dengan aksesibilitas dalam pemilu seperti ketersediaan alat bantu dan pendamping yang dipercayai.

Iya urung ngerti lah. Iya istilah'e urung-urung sepenuh'eh lah. Hak'e iya milih, hak'e milih angger hak-hak'e wong disabilitas iya ana cara noblose, ana ala bantune. Ana alat bantune juga ana pendampinge. Pendampinge bisa keluarga, pendampinge bisa petugas mriku... Salah satune iya pendamping niku, dadi mboten dijoraken mboten, dadi kudu ana pendampinge. Dampingan'e iya kudu trust . Nek ora kudu trust iya keluarga sing bisa dipercaya.⁶⁵
(Iya belum tahu, istilahnya belum sepenuhnya tahu. Haknya ya memilih, untuk penyandang disabilitas ya ada cara mencoblos dan ada alat bantunya dan ada pendampingnya. Pendampingnya bisa keluarga atau petugas disitu... Salah satunya ya pendamping itu, jadi

⁶⁴ Terkait dengan pemahaman atas CRPD, mereka yang tidak tahu sama sekali adalah para difabel tunanetra yang tidak memiliki keterlibatan aktif dalam organisasi difabel

⁶⁵ Nasrun, 9 Juni 2015.

tidak dibiarkan saja, harus ada pendamping. Pendampingnya harus *trust*. Kalau tidak bisa iya keluarga yang bisa dipercaya)

Hak-hak kami disitu dijelaskan sebenarnya tentang bisa mendapatkan bantuan *template* misalnya kaya gitu. Namun demikian kan karena ehh apa yah kondisi juga kaya pemilihan legislatif yang seperti itu memang belum bisa ditemukan cara untuk memudahkan kami.⁶⁶

4.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Terbentuknya Melek Politik

Berdasar deskripsi diatas bisa dilihat bahwa dari segi literasi politik, para difabel tunanetra ini memiliki kualitas kemelekan politik yang beragam. Dari yang memiliki pengetahuan politik terbatas sampai kepada mereka yang memiliki pengetahuan politik yang memadai sehingga bukan hanya menguasai pengetahuan-pengetahuan mendasar seputar politik elektoral namun bahkan bisa memberikan evaluasi atas sistem pemilu yang telah berlangsung dan menyampaikan usulan agar ada perubahan sistem.⁶⁷ Keberagaman kualitas kemelekan politik ini tentu tidak lepas dari hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya kondisi melek politik mereka. Beberapa hal berikut ini dapat menjelaskan bagaimana melek politik para difabel tunanetra terbentuk.

4.3.2.1 Keterlibatan Pada Organisasi Difabel

Salah satu hal yang jelas membedakan kondisi melek politik para difabel tunanetra adalah keterlibatan mereka pada organisasi difabel. Mereka yang tergabung aktif dalam organisasi difabel ini dari sisi substansi komentar atau

⁶⁶ Junaidi

⁶⁷ Junaidi. Informan ini misalnya mampu memberikan penilaian bahwa sistem pemilu legeslatif saat ini tidak efektif. Selain dalam pelaksanaannya memicu kanibalisme politik antar caleg dalam satu partai juga dengan adanya banyak partai dan caleg dalam sistem pemilu saat ini menyulitkan para difabel tunanetra untuk menggunakan hak pilihnya, apalagi tidak disediakan *template* untuk pemilu DPR dan DPRD.

pernyataan bisa dikatakan lebih melek secara politik daripada mereka yang tidak tergabung dalam organisasi. Misalnya dalam hal pengetahuan tentang partai-partai, pengenalan terhadap calon, pengetahuan tentang profil calon dan program yang ditawarkan serta pengetahuan tentang hak-hak politik mereka dalam CRPD.

Difabel tunanetra yang terlibat aktif dalam organisasi difabel, dalam hal ini Pertuni dan Putrabara memiliki informasi politik yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini wajar, sebab *pertama*, para difabel tunanetra yang tergabung dalam organisasi memiliki kesempatan untuk mengikuti pergaulan secara luas seperti pengakuan Nasrun dibawah ini :

*Lah informasi politik yang utama iya niku radio TV. Ning informasi yang lain iya, disamping pergaulan sering iya. Persatuan tunanetra karo wong-wong perkantoran misal'e lurah, camat. Ngujukolo kan ngujukolo lah apabila mau dicerahkan, hal itu kan dadine ngerti.*⁶⁸

(Lah informasi politik yang utama yaitu radio dan TV. Namun informasi lain juga yaitu pergaulan yang sering antara persatuan tunanetra dengan orang-orang kantor seperti lurah dan camat. Kadang-kadang jika mau mendapat pencerahan, sehingga mengerti)

Kedua, disamping faktor pergaulan, para difabel tunanetra yang tergabung dalam organisasi sering pula berkesempatan mengikuti program-program sosialisasi, lokakarya dan yang semacamnya yang tentu menambah wawasan sosial politik mereka. Seperti Junaidi yang sering mengikuti lokakarya dari berbagai instansi maupun LSM/NGO. Kesempatan seperti ini tidak dimiliki oleh difabel tunanetra yang tidak terlibat aktif dalam organisasi.

Adanya relawan demokrasi pada Pemilu 2104 lalu yang ditugaskan KPU Kabupaten Banjarnegara ke organisasi difabel tunanetra dan sosialisasi-sosialisasi

⁶⁸ Nasrun

yang dilakukan KPU menurut mereka cukup banyak memberi manfaat dalam mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Kegiatan sosialisasi pemilu dari KPU ini betul-betul diikuti dengan penuh antusias oleh para difabel tunanetra ini. Dalam kegiatan itu mereka juga berkesempatan berkumpul dan bersilaturahmi dengan sesama tunanetra dan biasanya diselingi dengan acara hiburan organ tunggal dimana mereka dapat mengekspresikan kegembiraan dengan menyanyi dan berjoget bersama.⁶⁹ Hanya saja menurut para difabel tunanetra, intensitas pelaksanaan sosialisasinya dirasa masih kurang dan perlu ditingkatkan.

4.3.2.2 Latar Belakang Pendidikan

Melek politik juga bisa dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Meskipun Neni Lailiyah hanya ibu rumah tangga dan tidak terlibat aktif dalam organisasi difabel, namun memiliki pengetahuan politik yang lebih baik dari pada informan-informan lain yang juga tidak aktif dalam organisasi difabel. Hal ini dikarenakan salah satunya oleh jenjang pendidikan yang ditempuhnya dimana yang bersangkutan pernah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat SMP. Sebab Neni, mengalami kebutaan bukan sejak lahir. Kualitas jawaban Neni maupun keluasan wawasan politiknya lebih tinggi dari tiga informan lain yang tidak tergabung dalam organisasi difabel dan berpendidikan SD atau tidak sekolah.

4.3.2.3 Intensitas mengakses beragam informasi

Melek politik juga dipengaruhi oleh intensitas seseorang dalam mengakses beragam informasi. Semua informan mengatakan bahwa mereka banyak mendapat

⁶⁹ Khuswatun Chasanah dan Iwan Tri Setiawan, wawancara oleh peneliti, Kantor KPU, 9 Juni 2015. Iwan Tri Setiawan adalah relawan demokrasi KPU yang bertugas mendampingi komunitas difabel tunanetra pada pemilu lalu. Ia juga merupakan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Banjarnegara. Informan memiliki hubungan yang sudah terjalin lama dengan para difabel tunanetra.

akses informasi tentang politik dari radio dan televisi. Hal ini ditegaskan oleh Setiawan, relawan demokrasi yang banyak mendampingi komunitas difabel tunanetra pada pemilu lalu, bahwa para difabel tunanetra ini dengan segala keterbatasannya sangatlah intens dalam mengikuti informasi terutama melalui media elektronik.⁷⁰ Hanya saja, intensitasnya berbeda-beda. Ada yang hanya kalau sempat, kadang-kadang, dan ada yang sangat sering, bahkan sampai dipanjer atau dinyalakan terus-menerus. Informan yang terlibat aktif dalam organisasi rata-rata sangat intens mengakses informasi politik dan pada saat pilpres kemarin juga mengikuti jalannya debat capres di televisi dengan antusias. Mereka juga menjadikan debat sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih calon-calon presiden.

*Lah kulo TV sing tek panjer TV One, radio sing tak panjer RRI Purwokerto Pro 1. Niku ngger Radio cara kulo mendidik lah. Niku segalane wonten teng pendidikan, hiburan, pengajian niku anu lengkap. Nggeh, lah nek TV anane debat karo politik TV One, dadi kulo seneng niku. Lah sing nggo pasti TV one, nggeh.*⁷¹

(Lah TV yang saya panjer adalah TV One, radio yang saya panjer RRI Purwokerto Pro 1. Menurut saya radio itu mendidik, segalanya ada dan lengkap baik tentang pendidikan, hiburan maupun pengajian. Untuk TV yang ada debat dan politiknya adalah TV One, jadi saya senang itu. Lah yang untuk pasti TV One, ya).

Iya mengikuti. Pendapat saya debat kemarin bagus karena kita jadi tahu kepribadian sang calon untuk menjadi seorang pemimpin. Debat capres menurut saya mempengaruhi pilihan saya, karena saya sendiri tidak tahu tentang mereka, akan tetapi dengan debat jadi sangat membantu.⁷²

Sebagian informan yang bisa membaca braile sebetulnya juga mengakses informasi melalui majalah, Hanya saja majalah berhuruf braile belum banyak

⁷⁰ Setiawan

⁷¹ Nasrun

⁷² Mustofa

memberikan informasi tentang permasalahan politik. Lebih banyaknya menyajikan liputan tentang *success story* para difabel. Bagi mereka yang menguasai braile, desain informasi pemilu yang tersedia dinilai belum cukup memberikan aksesibilitas. Pengumuman tentang DPT, surat undangan bagi pemilih dan surat suara untuk pemilu DPR dan DPRD tidak bisa mereka akses secara mandiri. Mau tidak mau mereka harus mengandalkan orang lain.⁷³ Demikian juga belum ada materi sosialisasi kepemiluan yang dicetak dan dibagikan dalam bentuk braile. Padahal jika hal itu tersedia akan sangat membantu mereka untuk meningkatkan literasi politik.

Namun demikian penyeragaman informasi dengan penggunaan braile tidak selamanya tepat, sebab para tunanetra yang menguasai braile ini hanya segelintir orang alias tidak semuanya melek braile. Dalam pemilu kemarin misalnya banyak tunanetra yang kesulitan menggunakan *template*. Perlu dipikirkan metode yang tepat dalam memfasilitasi difabel tunanetra yang tidak semuanya bisa membaca braile ini dan jumlahnya juga cukup besar⁷⁴. Mestinya media informasi dan sosialisasi yang diberikan kepada mereka adalah yang sesuai dengan karakteristik kemampuan mereka. Jika dalam penyelenggaraan pemilu ada upaya-upaya yang memudahkan mereka dengan menyediakan media yang pas, hal ini pasti akan direspon secara positif oleh para difabel tunanetra.⁷⁵ Alat-alat peraga misalnya, harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat kedifabelan. Kalau *template* dirasa belum maksimal kemanfaatannya, maka perlu dicari cara yang lebih efektif lagi dalam menjamin aksesibilitas. Oleh karena itu, sebaiknya

⁷³ Junaidi

⁷⁴ Ujang.

⁷⁵ Setiawan

komunitas tunanetra dirangkul dan dilibatkan dalam merumuskan dan mendesain media informasi dan sosialisasi yang tepat untuk mereka.⁷⁶

4.3.3 Literasi Politik dan Partisipasi dalam Memilih

Dengan segala keterbatasan akses terhadap informasi yang dialami oleh para difabel tunanetra dan keragaman kondisi literasi politiknya, ternyata tidak menyurutkan keinginan mereka untuk mengikuti pemilu. Sebab, para difabel tunanetra ini memandang bahwa berpartisipasi dalam memilih adalah tugas mereka sebagai warga negara.⁷⁷ Menurut pandangan mereka seorang warga negara yang baik, saat telah diberikan hak maka harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Hal inilah yang menjadi motivasi mereka untuk mengikuti pemilu. Bahkan, mereka akan merasa kecewa jika hak pilihnya tidak dapat ditunaikan. Selain itu, mengikuti pemilihan juga mereka anggap sebagai kontribusi dalam membuat negara ini bisa menjadi lebih baik

Hak'e tak gunakan sebaik-baiknya. Nek ana sing hak'e nyong ora danganu malah kulo dadi gela, misal'e ada pemilu kulo mboten dicatat, cara kulo gela, cara kulo eh anggep'e aku sih apa, wong aku be penduduk. Iya pada-pada punya hak walaupun tunanetra iya wong duwe pilihan duwe hak⁷⁸... Selagi masih hidup saya akan tetap milih.⁷⁹

(Hak saya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada hak saya yang tidak digunakan malah menjadi kecewa. Misal ada pemilu kok tidak dicatat, menurut saya mengecewakan, saya ini dianggap apa sih sedangkan saya juga penduduk. Iya yang sama-sama punya hak walaupun tunanetra, punya pilihan dan punya hak...Selagi masih hidup saya akan tetap milih)

⁷⁶ Junaidi.

⁷⁷ Pandangan seperti ini merata pada semua informan baik yang aktif terlibat dalam organisasi atau tidak. Sebagian malah memandang partisipasi dalam memilih sebagai kewajiban.

⁷⁸ Nasrun.

⁷⁹ Nasrun, 23 Juni 2015

Paling nggak saya bisa, namanya ya tunanetra kan kepingin carane, kepingin melakukan sesuatu ya mas.⁸⁰

Dari segi partisipasi dalam memilih hampir seluruh difabel tunanetra menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Hanya ada dua orang yang tidak menggunakan hak pilihnya. Yang pertama, tidak menggunakan hak pilihnya hanya saat pileg. Adapun yang kedua, sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya alias golput di pileg maupun pilpres. Informan pertama dengan penuh kesadaran beralasan bahwa ia merasa tidak mendapat informasi yang mencukupi tentang calon-calon legislatif yang ada. Selain karena tidak adanya alat bantu memilih pada saat pemilu DPR dan DPRD. Namun demikian, saat pilpres informan ini menggunakan hak pilihnya karena merasa memiliki informasi yang memadai untuk memilih, ada alat bantu dan karena calonnya memang hanya dua pasang. Ini memudahkan informan dalam menggunakan hak pilihnya.

Informan tersebut menyampaikan alasan kegolputannya sebagaimana kutipan dibawah ini. Sikap ini bisa dipahami karena informan tampaknya memiliki kemandirian yang tinggi dan tidak ingin didampingi dalam menggunakan pilihannya agar tetap rahasia dan tidak bisa dilihat atau diketahui orang lain. Selain tidak mau kalau kemudian hanya memilih partai saja.

Kalau untuk Pileg loh iya jujur saya tidak memilih. Sebenarnya bukan karena saya tidak mampu mungkin kalau hanya memilih partai saja saya mampu, jujur tapi kalau untuk memilih calon-calon legislatifnya itu kami kesulitan.... Kalau untuk Pileg kami nggak, kalau saya pribadi loh ya. Kalau temen-temen sih saya tanya ya pada milih kaya gitu. Kalau kesulitannya, kalau saya untuk misale ingin memilih salah satu calon di partai A gitu yah. Itu kan kita

⁸⁰ Hadriati

harus tahu partai A itu di urutan berapa *pertama*. Terus yang *kedua*, calon yang saya pilih nomor berapa juga kaya gitu loh. Itu dalam merabanya itu kita yang kesulitan. Itu permasalahan teknis dan itu mayoritas kesulitannya seperti itu.

Adapun informan yang sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya saat pileg maupun pilpres adalah informan Muharjo yang selain mengalami ketunanetraan juga menderita kesulitan berjalan. Difabilitas ganda ini membuat informan mengalami dua hambatan sekaligus. *Pertama* hambatan dari segi informasi. Ia merasa tidak dikabari terkait dengan pemilu saat ini. Padahal pemilu sebelumnya masih ikut mencoblos. *Kedua*, hambatan dari segi teknis. Ia tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak ingin menyusahkan orang lain berkait dengan kondisi fisiknya tersebut.

*Jaman dulu iya milih, lah niki jaman pilihan sekaranglah tidak. Pokokke bar lah kulo mboten dikabari apa-apa.... Dikabari nnggeh mboten saged ngerjani...Anu mpun lumpuh, mbok dadi gawe karo sing waras.*⁸¹

(Jaman dahulu memilih, pemilu yang sekarang tidak. Pokoknya sudah tidak dikabari apa-apa... Dikabaripun tidak bisa mengerjakan...Anu sudah lumpuh, malah nanti merepotkan orang yang normal).

Secara implisit terlihat bahwa informan sebenarnya masih mau menggunakan hak pilihnya. Sebab, periode sebelumnya masih ikut pemilu. Hanya saja ia tidak mau menyusahkan orang lain yang nantinya harus repot mengurus pemenuhan hak pilihnya. Sangat boleh jadi terdapat sejumlah pemilih lain yang bernasib seperti ini. Oleh karena itu perlu ada perbaikan kebijakan yang bisa menjamin pelayanan atas hak konstitusional mereka ini dengan sebaik-baiknya. Yakni dalam hal memfasilitasi akses informasi politik dan pemilu yang sesuai

⁸¹ Muharjo.

dengan karakter kedifabelan mereka maupun dalam hal memudahkan mereka pada saat menggunakan hak pilihnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil dan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Para difabel tunanetra ini memiliki kualitas kemelekan politik yang beragam. Dalam hal pengetahuan tentang pemilu DPR, DPRD dan Pemilu Presiden secara umum para difabel ini memahami pengertiannya. Hanya saja untuk Pemilu DPD, hampir semuanya tidak tahu dari segi substansinya. Mereka juga tidak ada yang mengenal satupun calon DPD. Untuk pengetahuan tentang partai-partai, pengenalan terhadap calon non DPD, pengetahuan tentang profil calon dan program yang ditawarkannya, kondisi literasi politik difabel tunanetra ini bergradasi dari yang memiliki pengetahuan politik terbatas sampai kepada mereka yang memiliki pengetahuan politik yang memadai. Secara umum mereka juga tahu bahaya politik uang yang muaranya akan memicu korupsi. Sedangkan terkait pemahaman tentang hak-hak politik mereka dalam (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) CRPD, sangat sedikit yang mengetahuinya.
- 2) Keberagaman kualitas kemelekan politik ini tidak lepas dari hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya kondisi kemelekan politik mereka. Beberapa faktor yang bisa menjelaskan adalah keterlibatan pada organisasi difabel,

latar belakang pendidikan dan intensitas dalam mengakses beragam informasi. Mereka yang terlibat aktif dalam organisasi difabel, memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan yang intens dalam mengakses beragam informasi memiliki kualitas kemelekan politik yang lebih baik

- 3) Kondisi keterbatasan akses terhadap informasi dan keragaman kualitas literasi politik para difabel tunanetra ini tidak menyurutkan keinginan mereka untuk berpartisipasi mengikuti pemilu. Para difabel tunanetra ini memandang partisipasi dalam memilih adalah tugas kewarganegaraan

5.2 Saran

- 1) Kaum difabel tunanetra ini membutuhkan bukan sekedar sosialisasi pemilu, akan tetapi pendidikan politik terkait pemahaman konsep dasar dan informasi faktual politik yang intensitasnya perlu ditingkatkan serta menjangkau segmen yang lebih luas terutama difabel tunanetra yang tidak ikut tergabung aktif dalam organisasi difabel
- 2) Komunitas tunanetra harus dirangkul dan dilibatkan dalam merumuskan dan mendesain media informasi dan sosialisasi yang tepat bagi mereka yang disesuaikan dengan karakteristik kedifabelan dan kemampuan mereka.
- 3) Diperlukan perbaikan kebijakan yang bisa menjamin pelayanan atas hak konstitusional kaum difabel tunanetra baik dalam hal akses informasi maupun akses penggunaan hak pilih. Dalam ini perlu ada perhatian yang serius kepada mereka yang mengalami difabilitas ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaidar, *Pokoknya Rekayasa Literasi*. Bandung: Kiblat Buku Utama, 2012.
- Afifuddin, M. “Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu”. Makalah dipresentasikan dalam *Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections*. Jakarta, 22-24 April 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*. Jakarta :Rineka Cipta, 2002.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Cassel, Carol A. dan Celia C. Lo, “Theories of Political Literacy,” *Political Behaviour* 19, no. 4 (1997), 317-335
- Chang Yan, Margaret. “Study of Political Literacy of Women Group Members in Community Development Service in Hong Kong”. Disertasi PhD, University of Hong Kong, 1993.
- Cobuild, Collin, *New Student Dictionary*. New York : Harper Collin Publisher, 2002.
- Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). *Daftar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015*. Banjarnegara : Dinsosnakertrans. 2015
- Fakih, Mansour. “Akses Ruang Yang Adil Meletakkan dasar Keadilan Sosial Bagi Kaum Difabel.” Makalah dipresentasikan dalam Diseminasi Nasional “Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua” di Yogyakarta 27 – 28 September 1999. Diakses 1 Juni 2015. <http://suryaden.com/syahadat-indonesia/analisis-kritis-diskriminasi-terhadap-kaum-difabel>
- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta :Rajawali Pers, 1999.
- Fuad, Bahrul. “Difabel, Sebuah Simbol Perlawanan Ideologis.” Cak Fu. Diakses 1 Juni 2015. <http://cakfu.info/2010/08/difabel-sebuah-simbol-perlawanan-ideologis/>

- Hernowo." Pembelajaran Adaptif Tunanetra." Her Spasi Nowo. Diakses 2 Juni 2015. <https://herspasinowo.wordpress.com/2015/06/13/makalah-pembelajaran-adaptif-tuna-netra/>
- JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat). *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia*. Jakarta: JPPR, 2014.
- Kus, Zafer . "Political Literacy Status of Pre-Service Social Studies Teacher". *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 177 (2015): 197-202.
- Latif, Yudi. "Debat Capres, Bukan Basa-basi." *Kompas*, 28 Juni 2004
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Hubberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press. 1992.
- "Minat warga Difabel dalam Pemilu Masih Kurang." *Kavling 10*, diakses 30 Mei 2015. <http://kavling10.com/2014/04/minat-warga-difabel-dalam-pemilu-masih-kurang/>
- "Minim Sosialisasi Pilpres Untuk Tunanetra." *Sinar Harapan*, 4 Juli 2014, diakses 30 Mei 2015. <http://sinarharapan.co/news/read/140704345/minim-sosialisasi-pilpres-untuk-tunanetra-nbsp->
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung :Remaja Rosdakarya, 2007.
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. "Penyandang disabilitas Butuh Fasilitas Untuk Mandiri ,". Diakses 30 Mei 201 5. <http://banjarnegarakab.go.id/v3/index.php/berita-165/sosial-budaya/2300-difabel-disabilitas-butuh-fasilitas-untuk-mandiri>
- Pertuni. "Selamat Datang di situs Web Pertuni." Diakses 3 Juni 2014. <http://pertuni.idp-europe.org/>
- Pusat Pemilihan Umum Akses–Difabel Cacat (PPUA-PENCA), *Buku Panduan Akses Pemilu. Jaminan Partisipasi Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas* . Jakarta: PPUA-PENCA, 2011.
- Rumah Pemilu. "Gambaran Singkat Pemilihan Umum 2014 di Indonesia." Diakses 30 Mei 2015.

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/3366/Brief-Overview-of-the-2014-Elections-in-Indonesia.html>

- Sausan, H Sarah. “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 Di Kota Medan” . Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Satori, Djam’an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2008.
- Sutopo, Heribertus. *Pengantar Penelitian Kualitatif* . Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1988.
- Temu inklusi 2014. “Workshop Partisipasi Politik Difabel dalam Pemilu 2014.” Diakses 1 Juni 2015. <http://ti2014.solider.or.id/events/20-sabtu/workshop-partisipasi-politik-difabel-dalam-pemilu-2014>
- UNESCO, *The Plurality of Literacy and its implications for Policies and Programs* . Paris ; UNESCO, 2004.
- UNESCO. “Understanding of Literacy” dalam *Education for All Global Monitoring Report 2006*, UNESCO. Diakses 30 Mei 2015. http://www.unesco.org/education/GMR2006/full/chapt6_eng.pdf
- Yin, Robert K. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.